

PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA ALAT LISTRIK JCH DAN SPI PADA DINAS PPKUKM DKI JAKARTA

Adelia Eka Putri Damayanti

ABSTRAK

Perkembangan arus globalisasi dan reformasi pemerintahan yang diikuti dengan keterbukaan memberikan suatu tuntutan bagi bangsa Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain dan munculnya aspek akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran negara maupun daerah. Hadirnya tuntutan tersebut memberikan pengaruh terjadinya pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber penerimaan daerah yang dimilikinya. Dalam melakukan pengelolaan anggaran daerah, pemerintah daerah berpedoman kepada suatu dokumen yang disebut dengan APBD. Salah satu komponen dalam APBD adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakan suatu transaksi pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja daerah ini juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM DKI Jakarta. Adanya pengelolaan JCH yang dilakukan oleh Bidang UKM pada Dinas PPKUKM DKI Jakarta, menyebabkan terjadinya transaksi belanja alat listrik untuk mendukung kegiatan operasional JCH. Dalam melakukan pembayaran atas belanja barang dan jasa, Dinas PPKUKM DKI Jakarta memiliki 2 sistem yaitu SIPKD dan CMS, serta melalui 2 mekanisme yaitu mekanisme Uang Persediaan dan mekanisme Langsung.

Kata Kunci : Belanja daerah, Belanja alat listrik, Prosedur, Pembayaran

JCH ELECTRICAL EQUIPMENT PAYMENT PROCEDURE AND SPI AT DINAS PPKUKM DKI JAKARTA

Adelia Eka Putri Damayanti

ABSTRACT

The development of globalization and government reforms which are followed by openness provide a demand for the Indonesian people to be able to compete with other countries and the emergence of aspects of accountability and transparency in the management of state and regional budgets. The presence of these demands has the effect of delegating central government affairs to local governments, known as regional autonomy. Regional autonomy gives local governments the freedom to manage their local revenue sources. In managing the regional budget, the regional government is guided by a document called the APBD. One of the components in the APBD is regional spending. Regional expenditure is a transaction of spending money carried out by local governments. This regional expenditure is also one of the activities carried out by the Dinas PPKUKM DKI Jakarta. The existence of JCH management carried out by the SME Sector at the Dinas PPKUKM DKI Jakarta, has led to transactions for purchasing electrical equipment to support JCH operational activities. In making payments for goods and services, the Dinas PPKUKM DKI Jakarta has 2 systems, namely SIPKD and CMS, as well as through 2 mechanisms, namely Money Supply mechanism and Direct mechanism.

Keywords : *Regional Expenditure, Electrical Equipment Expenditure, Procedure, Payment*